



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2012-2015**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nur Arifah Hasanah**

**NIM 140810101215**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2012-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Nur Arifah Hasanah  
NIM 140810101215**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Holifah dan Ayahanda Tore'at tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Kakakku Nanang Qosem dan Eko Sulaksono, beserta adikku M.Latif Al-Amin yang selalu memberi semangat dan motivasi;
3. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah.”

(HR. Turmudzi)

“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.”

( Mahatma Ghandi)

“Prestasi adalah apa yang mampu Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya.”

(Lois Holtz)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Arifah Hasanah

NIM : 140810101215

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2018

Yang menyatakan,

Nur Arifah Hasanah

NIM 140810101215

**SKRIPSI**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2012-2015**

Oleh

Nur Arifah Hasanah  
NIM 140810101215

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi :Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),  
Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks  
Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat  
Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun  
2012 - 2015

Nama Mahasiswa : Nur Arifah Hasanah  
NIM : 140810101215  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Tanggal Persetujuan : 15 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Nanik Istiyani, M.Si  
NIP. 196101221987022002

Dr.Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si  
NIP. 197002061994031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001



**PENGESAHAN**

Judul Skripsi

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2012-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Arifah Hasanah

NIM : 140810101215

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P. (.....)  
NIP. 195504251985031001
2. Sekertaris Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. (.....)  
NIP. 195812061986031003
3. Anggota Fivien Muslihatinningsih, S.E.,M.Si. (.....)  
NIP. 198301162008122001

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA  
NIP. 197107271995121001



*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2015*

**Nur Arifah Hasanah**

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa time series (tahun 2012-2015) dan cross section (29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode Random Effect digunakan alat bantu software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015, akan tetapi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015.

**Kata kunci :** Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka.

*The Effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), District Minimum Wage (DMW), and Human Development Index (HDI) on Open Unemployment Rate in East Java Province 2012-2015*

**Nur Arifah Hasanah**

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), District Minimum Wage (DMW), and Human Development Index (HDI) on Open Unemployment Rate in East Java Province. This research is a quantitative research using panel data, data used in the form of time series (2012-2015) and cross section (29 districts and 9 cities in East Java province). The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (CBS) and the journal as a supporter. The analysis method used is linear regression analysis method of panel data with Random Effect method used Eviews 9 software tool. The results showed that, the variable of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Human Development Index (HDI) have a significant influence on open unemployment rate in East Java in 2012-2015, but District Minimum Wage (DMW) does not have a significant effect on open unemployment rate in East Java Province in 2012-2015.*

*Keywords: Gross Regional Domestic Product, District Minimum Wage, Human Development Index, Open Unemployment Rate*

## RINGKASAN

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015;**  
Nur Arifah Hasanah; 140810101215; 2018; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun-ketahun mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga kerja. Hal itu akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada permintaannya, sehingga memunculkan fenomena pengangguran. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 38.106.590 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,02% dan pada tahun 2015 jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 38.847.561 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,47%. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2012 angka Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai angka 4,02%. Tetapi pada tahun 2013 meningkat menjadi

4,30%, terus turun pada tahun 2014 menjadi 4,19%, dan tahun 2015 menjadi 4,77% mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 2012-2015.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel *dependen* yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Jawa Timur. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* dan *cross section* periode tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0.433354 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,00351 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , artinya setiap kali PDRB mengalami kenaikan sebesar koefisien 0.433354 maka tingkat pengangguran terbuka akan bertambah. Nilai koefisien regresi variabel UMK sebesar -0,630681 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,1620 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , artinya UMK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien regresi variabel IPM sebesar 0,177509 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , artinya setiap kali IPM mengalami peningkatan sebesar koefisien 0,177509, maka tingkat pengangguran terbuka akan bertambah.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa PDRB dan IPM mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Sedangkan UMK tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2012-2015.



## PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, karunia dan Hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Nanik Istiyani, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Ibunda Holifah dan Ayahanda Tore'at yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;
8. Kakakku Nanang Qosem dan Eko Sulaksono, serta adikku M. Latif Al-Amin yang telah memberi dukungan dan semangat;
9. Rekan-rekan terbaik di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Zulva Aniq, Eka Ospin Trisulawati, Farah Nadya H.M dan Annisa Luthfiana Pratiwi terimakasih atas motivasinya dan kenangan selama empat tahun bersama-sama baik suka maupun duka dalam masa perkuliahan, sukses untuk The Biggest;
10. Teman-teman alumni MAN 1 JEMBER tercinta, Nur Aisyah, Silvia Mei Kurniawati, Diniyatul Ma'rufah, dan Riza Nisriinaa terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan semua waktu yang kalian berikan untuk selalu menghibur saya;
11. Kelompok KKN 66 2017 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang telah menghabiskan waktu selama empat puluh lima hari dengan canda tawa serta pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 16 April 2018

Penulis

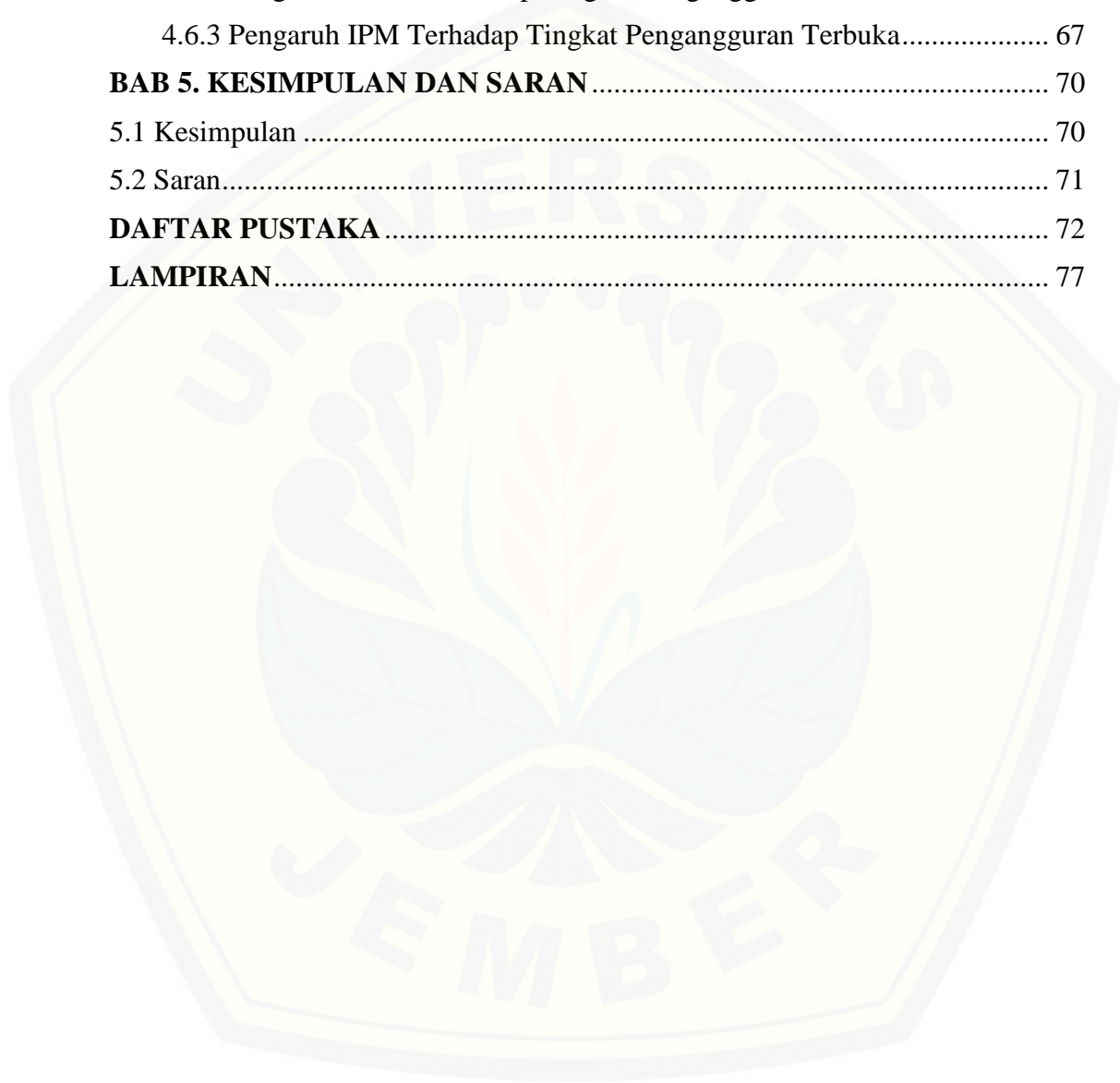
**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	8
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi .....	8
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	10
2.1.3 Teori Pengangguran .....	13
2.1.4 Teori Produk Domestik Regional Bruto .....	16
2.1.5 Teori Upah .....	19
2.1.6 Teori Indeks Pembangunan Manusia.....	22



2.1.7 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	23
2.1.8 Hubungan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	25
2.1.9 Hubungan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	25
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>27</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>30</b>
<b>2.4 Hipotesis .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Sumber Data .....</b>	<b>33</b>
<b>3.3 Metode Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
3.3.1 Analisis Regresi Data Panel .....	33
3.3.2 Estimasi Regresi Data Panel .....	36
3.3.3 Uji Model Data Panel.....	37
3.3.4 Uji Statistik .....	39
3.3.5 Uji Asumsi Klasik.....	40
<b>3.4 Definisi Variabel Operasional.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Gambaran Umum .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Keadaan Geografis di Provinsi Jawa Timur .....	43
4.1.2 Gambaran Umum Kondisi Demografi di Provinsi Jawa Timur .....	45
4.1.3 Gambaran Perekonomian di Provinsi Jawa Timur .....	46
<b>4.2 Gambaran Umum Variabel .....</b>	<b>48</b>
4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.....	48
4.2.2 PDRB di Provinsi Jawa Timur.....	50
4.2.3 Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Timur .....	52
4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur .....	54
<b>4.3 Hasil Analisis Data .....</b>	<b>56</b>
4.3.1 Hasil Uji Chow .....	56
4.3.2 Hasil Uji Hausman .....	57
4.3.3 Hasil Uji LM .....	57
4.3.4 Analisis Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> .....	58

<b>4.4 Pengujian Kriteria Statistik .....</b>	<b>59</b>
<b>4.5 Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>62</b>
<b>4.6 Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
4.6.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	65
4.6.2 Pengaruh UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	66
4.6.3 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	67
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

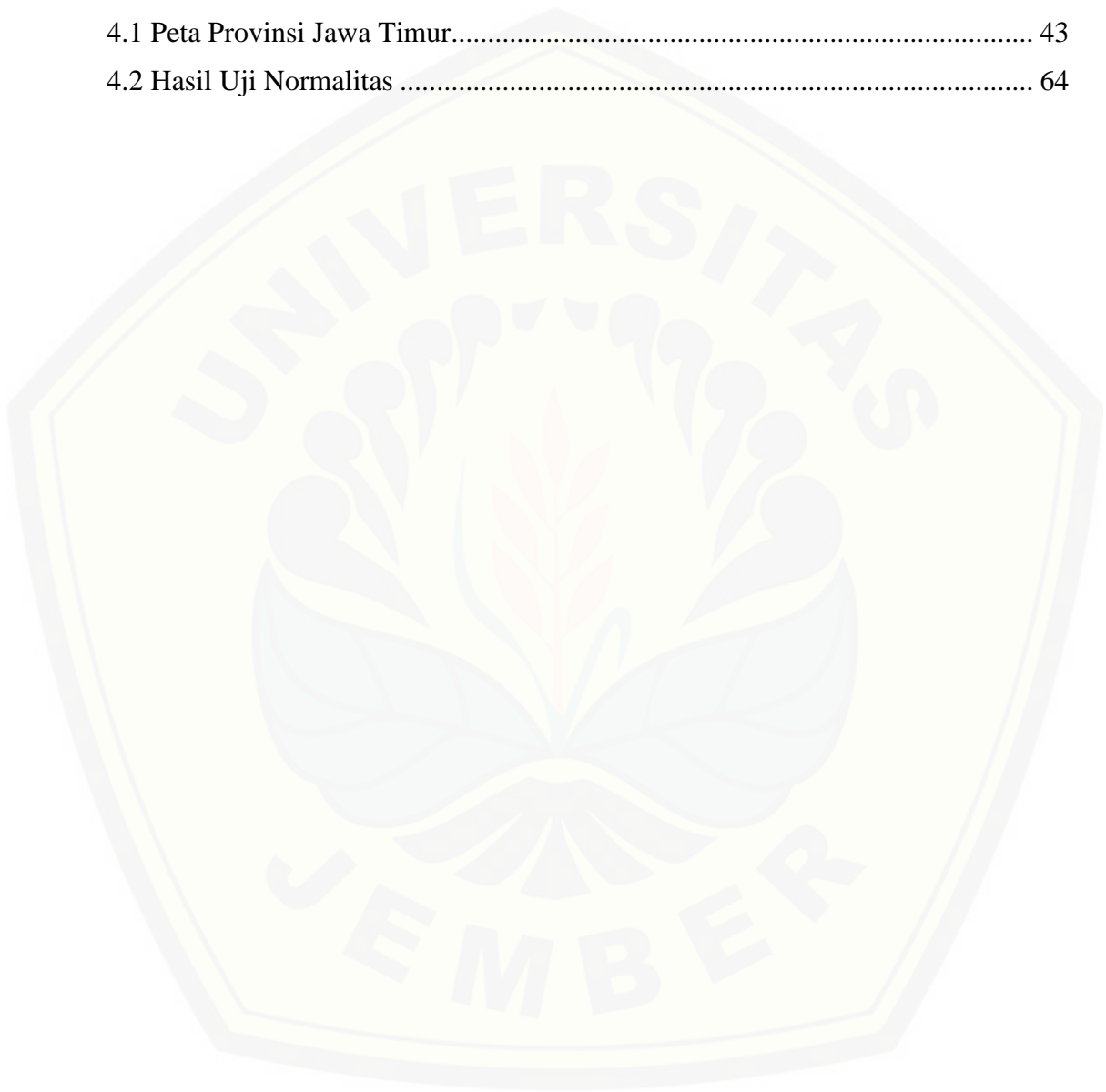


**DAFTAR TABEL**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
4.1 Jumlah Penduduk di Jawa Timur .....	45
4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur .....	47
4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur .....	49
4.4 Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur .....	51
4.5 Upah Minimum Kabupaten di Jawa Timur.....	53
4.6 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.....	55
4.7 Hasil Uji Chow.....	56
4.8 Hasil Uji Hausman .....	57
4.9 Hasil Uji LM .....	57
4.10 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect</i> .....	58
4.11 Hasil Uji F.....	60
4.12 Hasil Uji t.....	60
4.13 Hasil Koefisien Determinasi .....	61
4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63

**DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Konseptual .....	30
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	43
4.2 Hasil Uji Normalitas .....	64



DAFTAR LAMPIRAN

A	Data TPT, PDRB, UMK, dan IPM .....	77
B	Data TPT, PDRB, UMK, dan IPM Setelah di LOG .....	81
C	Hasil Uji Chow .....	85
D	Hasil Uji Hausman .....	86
E	Hasil Uji LM .....	87
F	Hasil Regresi Data Panel ( <i>random effect</i> ) .....	88
G	Hasil Uji F .....	88
H	Hasil Uji t .....	89
I	Hasil ( $R^2$ ) .....	89
J	Hasil Uji Multikolinearitas .....	89
K	Hasil Uji Heteroskedasdisitas .....	90
L	Hasil Uji Normalitas .....	91

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun-ketahun mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga kerja. Hal itu akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada permintaannya, sehingga memunculkan fenomena pengangguran. Di satu sisi, pengangguran menunjukkan adanya selisih antara permintaan (demand of labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor) dalam suatu perekonomian. Sedangkan pertambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah buruk (Budiarto dan Munir, 1985).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan dalam mengukur perkembangan perekonomian di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, fokus permasalahan bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan secara riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi, tingkat



pendapatan perkapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2008:423).

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai negara berkependudukan terbesar kelima di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta orang pada tahun 2012, berarti merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar yang menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan (Subagiarta, 2012:14).

Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000:56).

Menurut Todaro (2000) salah satu manifestasi (akibat) utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya (*employment*), termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif sangat rendah. Adapun penyebab utamanya ada dua hal. Yang pertama adalah adanya pengangguran terselubung (*underemployment*); artinya, orang-orang bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Kemudian yang kedua adalah tingginya tingkat pengangguran penuh atau terbuka (*open unemployment*), yakni orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana



salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator –indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Permasalahan pengangguran di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuatif yaitu tingkat pengangguran terbuka masih naik turun. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi terluas diantara provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat dan memiliki jumlah Kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Timur berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. PDRB Jawa Timur menempati urutan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Tahun 2015 PDRB DKI Jakarta sebesar 1.454.102 Milyar Rupiah dan Jawa Timur sebesar 1.331.418 Milyar Rupiah dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,88% dan Jawa Timur sebesar 5,55%. Provinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan eksternal. Ketidakseimbangan ekonomi internal dengan indikator bahwa tingkat output wilayah Jawa Timur maupun tingkat kesempatan kerja di Jawa Timur tidak mencapai kesempatan kerja penuh. Pada tahun 2012 angka Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai angka 4,02%. Tetapi pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,30%, terus turun pada tahun 2014 menjadi 4,19%, dan tahun 2015 menjadi 4,77% mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 2012-2015 (BPS Jawa Timur, 2017). Ketidakseimbangan ekonomi eksternal ditandai dengan pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar akibat kebijakan ekonomi luar negeri seperti yang terjadi di awal Pemerintahan baru tahun 2015, nilai rupiah melemah terhadap dollar menjadi Rp 13.867. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Timur dijadikan objek penelitian karena dengan jumlah penduduk yang besar dan pengaruh dari kondisi perekonomian internal maupun eksternal akan menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat dan signifikan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur apabila tidak diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 38.106.590 jiwa dengan tingkat pengangguranterbuka sebesar 4.02% dan pada tahun 2015 jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 38.847.561 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,47%. Masalah Pengangguran seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan harus mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah- langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya dalam penanganan permasalahan pengangguran.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan dalam indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat tersebut ( Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk dalam suatu wilayah. Dengan kata lain penduduk miskin akan berkurang.

PDRB mempunyai pengaruh terhadap angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta sehingga nantinya angka pengangguran turun.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah besarnya UMK. Upah merupakan pembayaran atas jasa fisik

maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2009). Penetapan tingkat upah pada suatu wilayah memberikan dampak pengaruh terhadap pengangguran. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat upah minimum sebesar sepuluh persen akan mengurangi para pekerja usia muda satu sampai dua persen maka akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Mankiw, 2007). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya *output* yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Namun dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki tingkat UMK yang terus mengalami peningkatan dan cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan upah tersebut juga diiringi dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami fluktuasi selama periode waktu tertentu. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya efek perubahan yang ditimbulkan disetiap terjadi peningkatan upah dalam periode tertentu.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak .

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa PDRB, UMK, dan IPM merupakan komponen penting dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Diperlukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui “Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah pengangguran merupakan salah satu akibat dari adanya fenomena ekonomi yang terjadi. Besarnya angka pengangguran dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain adalah PDRB, UMK, dan IPM. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara rinci sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta mampu memadukan dengan fakta yang ada di lapang;

2) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai wacana penelitian selanjutnya bagi berbagai kalangan pada umumnya serta segenap civitas Universitas Jember pada khususnya;

3) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan sumber pengambilan keputusan serta kebijakan dalam suatu lingkup kawasan tersebut.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

David Ricardo dalam buku *The Principle of Political Economy and taxation* (1772-1823) melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi.

Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu:

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi produksi,
2. Berlakunya hukum : “ *law of deminishing return* ” bagi tanah,
3. Persediaan tanah adalah tetap,
4. Permintaan gandum benar-benar inelastik,
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel,
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu,
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal,
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu,
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal,
10. Terdapat persaingan sempurna,
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor-faktor

produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

David Richardo membagi masyarakat dalam tiga golongan yaitu :

1. Masyarakat pengusaha atau kapitalis, adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.
2. Masyarakat pekerja atau buruh, adalah golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada kapital.
3. Tuan tanah atau bangsawan, adalah golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan.

David Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah (*land rent*); teori nilai kerja (*labor theory of value*) dan upah alami (*natural wages*); dan satu lagi yang terkenal adalah teori keuntungan komparatif (*comparative advantage*) dari perdagangan internasional.

Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktifitas dan efisiensi tinggi. Salah satu teori pembangunan ekonomi dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow yang memabagi proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Masyarakat tradisional yaitu pada tahap ini pemanfaatan teknologi dan sistem produksi masih terbatas, pertanian menjadi sumber utama pendapatan negara sehingga sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan ekonomi,
- b. Prakondisi tinggal landas adalah tahap yang merupakan tahap transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan mulai dibangun. Perekonomian



- mulai bergerak secara dinamis, industri-industri mulai bermunculan, perkembangan teknologi pesat dan lembaga keuangan mulai bermunculan,
- c. Tinggal landas adalah tahap dimana tahap yang mulai ditandai dengan adanya inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya dengan semakin tinggi investasi maka akan dibuka peluang usaha baru yang dapat mempercepat perputaran roda perekonomian sehingga akan mendorong meningkatnya pertumbuhan pendapatan nasional yang lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk,
  - d. Tahap kedewasaan yaitu tahap dimulai dengan penerapan teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki,
  - e. Tahap konsumsi tinggi adalah tahap akhir dari tahapan pembangunan yang ditandai dengan migrasi besar-besaran dari masyarakat kota ke pinggiran perkotaan, yang menjadi fokus utama dalam tahap ini adalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Suryana (2000:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004:35) pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu :

### 1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu “*the law of deminishing return*” dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berfikir tradisional.

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa (Suryana, 2000:57):

- a) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b) Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk.
- c) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai “*stationary state*”, yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.
- d) *The law of deminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan penambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

## 2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudiandiikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade.

Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58):

- a) Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b) Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e) Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Selanjutnya dalam Sukirno (2004:437), menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

### **3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern**

#### a) Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya "*The Stages of economic* " (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, yaitu (Arsyad, 2004:48):

1. *The traditional society* (masyarakat tradisional).
2. Persyaratan tinggal landas.
3. Tinggal landas.
4. Menuju kematangan.
5. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

#### b) Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Paul M Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru

mengenai faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan bidang teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan dalam pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau endogen tapi teknologi merupakan dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2008:33).

### **2.1.3 Teori Pengangguran**

Pengangguran adalah orang yang mampu bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin bekerja baik secara aktif maupun secara pasif mencari pekerjaan. Maka tergolong angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran adalah kejadian atau keadaan orang yang sedang menganggur. Dalam pengertian makro ekonomi, pengangguran adalah sebagian dari angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro ekonomi, pengangguran adalah keadaan seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan (Suroto, 1992:86).

Menurut Simanjuntak (1998), penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2004:79) .

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang



buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Marius (2004) menyatakan bahwa bila ditinjau dari sebab - sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (Transisional).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern.

6. Pengangguran Politis



Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.

## 7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

### 2.1.4 Teori Produk Domestik Regional Bruto

Transformasi struktural suatu perekonomian subsisten di rumuskan oleh seorang ekonom besar yaitu W. Arthur Lewis. Dengan teorinya model dua sektor Lewis antara lain (Hasani,2010:19):

#### a. Perekonomian Tradisional

Dalam teori ini Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten, hal ini diakibatkan kelebihan penduduk dan di tandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu faktor bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut di tarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya.

#### b. Perekonomian Industri

Pada perekonomian ini terletak pada perkotaan modern yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Dengan demikian perekonomian perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari 18 pedesaan sehingga penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi.

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut di atas diasumsikan akan terus

berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan di serap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat di tarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian modern yang berorientasi kepada pola kehidupan perkotaan (Hasani, 2010:21).

PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui besarnya PDRB, baik secara sektoral maupun secara perkapita. Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh BPS menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Pengumpulan data PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan dari departemen/instansi terkait. Data yang dikumpulkan dari setiap sektor antara lain berupa data produksi, data harga di tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, data harga di tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, serta data pengeluaran, yang diperoleh baik melalui survei maupun estimasi.

2. Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan departemen/instansi terkait yang secara resmi mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah, serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus.

Berikut ini terdapat tiga pendekatan cara menghitung PDRB dengan menggunakan metode langsung (Tarigan, 2007:57) yaitu:

## 1. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan Regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total keseluruhan dari produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi:

- c. Rumah tangga
- d. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan
- e. Konsumsi pemerintah
- f. Pembentukan modal tetap bruto (investasi)
- g. Ekspor netto (total ekspor dikurangi total impor)

## 2. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi merupakan cara penentuan pendapatan regional yang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian. Oleh karena itu, untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai produksi dari masing-masing sektor tersebut.

## 3. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

## 2.1.5 Teori Upah

Sistem pengupahan disuatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu: (1) Berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas; (2) Berdasarkan pada teori pertambahan penduduk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara-negara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya digunakan di negara-negara yang digolongkan kapitalis. Sistem pengupahan menurut teori Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan atas pertentangan kelas. Pada dasarnya pendapat Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang . Sedangkan dari pendapat lainnya dari teori Karl Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya adalah pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah. Untuk itu tiada jalan lain bagi buruh kecuali untuk menjadi milik bersama (Sumarsono, 2015:127).

Menurut Alghofari (2010), balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu : upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan “upah” untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan (Gilarso, 2003:32).

Kebijakan dalam pemberlakuan dan peningkatan upah riil berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam masyarakat. Adanya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang



dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, disisi lain (pengusaha) justru berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan jika UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan berakibat berkurangnya tenaga kerja (Kurniawan, 2013: 61).

Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003). Sistem upah menurut Gilarso (2003:77) :

a) Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dll).

b) Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena kayawan tidak tergesa-gesa, administrasinya pun dapat sederhana. Disamping itu perlu pengawasan apakah si pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.

c) Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.



d) Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi “premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and motion study*.

e) Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah PT *tantieme*; bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f) Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum Juncto Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No 01 tahun 1999. Dalam peraturan ini upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi(UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan

Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan ; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1(satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun. Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga Upah Minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP) , Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).

## **2.1.6 Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dari hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perhitungan IPM mengalami perubahan metodologi. Alasan pertama yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM yaitu beberapa indikator sudah tidak digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat

pendidikan antar daerah dengan baik. Kemudian, PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua yaitu penggunaan rumus-rumus aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Indikator IPM saat ini angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Keunggulan IPM metode baru yaitu menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengukuran Riil per Kapita yang disesuaikan

BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

## 2.1.7 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan

suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah ukuran barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2009:34).

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dari (Nainggolan, 2009) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara” yang menjadi rujukan dan persamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. Adapun pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia berdampak pada derasnya modal yang masuk sehingga memberikan kesempatan kerja yang ditandai dengan banyaknya sektor usaha baru yang muncul dimana sistemnya berorientasi pada padat karya, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Dalam teori relevannya, setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga dapat mengurangi pengangguran.



### **2.1.8 Hubungan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Alghofari (2010) bahwa Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran (Mankiw, 2007:87).

Menurut Alghofari (2010), menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.

### **2.1.9 Hubungan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan



pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan dapat kita lihat dari jumlah indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan.

Menurut Sukirno (2004:139), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kepada rendahnya indeks pembangunan manusia karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

Teori *Human Capital* menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan.

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun

konsumsinya. Dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran yang selama ini terjadi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2013) dengan judul “Analisis pengaruh PDRB,UMK dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011” dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel PDRB,UMK,dan Inflasi dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa PDRB,UMK berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan inflasi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 1990-2010” dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda ordinary Least Square (OLS). Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012” dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdhania (2016) dengan judul “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember” dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel Jumlah penduduk, inflasi,

upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

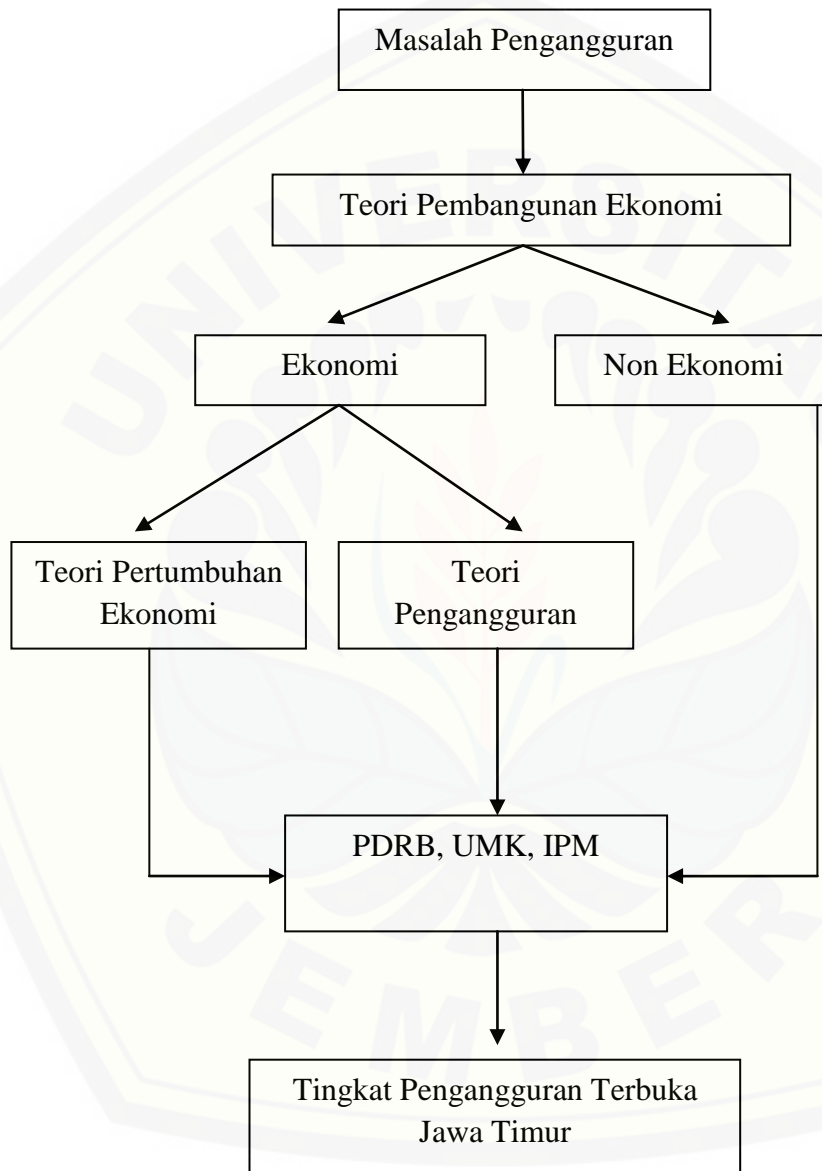
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Kurniawan (2013)	Analisis pengaruh PDRB,UMK dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011	PDRB,UMK, dan Inflasi	Regresi Linier Berganda	PDRB,UMK berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran sedangkan inflasi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran
Adhitya (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 1990-2010	Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah	Regresi Linier Berganda dan metode ordinary Least Square (OLS)	Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran
Nurcholis (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan	Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh negatif dan

	Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012	Manusia		signifikan terhadap tingkat pengangguran sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Firdhania (2016)	Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember	Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah tentang terjadinya pengaruh tingkat pengangguran terbuka yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran di Jawa Timur yaitu pembangunan ekonomi, apabila pembangunan ekonomi semakin maju tentu akan berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran berkurang. Pembangunan non ekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, dimana IPM yang tinggi menunjukkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kualitas hidup manusia yang semakin baik dan tingkat produktifitasnya tinggi sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Pembangunan ekonomi tentu disertai dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun akan berdampak pada dasarnya modal yang masuk sehingga memberikan kesempatan kerja yang tinggi, ditandai dengan banyaknya sektor usaha baru yang muncul. Selanjutnya pada sektor ekonomi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) mempengaruhi Tingkat pengangguran terbuka, dilihat dari sisi pengusaha, penetapan upah yang tinggi akan menjadi tambahan biaya produksi sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sementara variabel terikatnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Di duga PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Di duga UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Di duga IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif, adalah jenis penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel *dependen* dan *independen*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih menitik beratkan pada teori, mengukur variabel dengan menggunakan angka dan menganalisis data sesuai dengan prosedur statistik. Variabel *dependen* (terikat) dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun variabel *Independen* (bebas) yang digunakan adalah PDRB, UMK, dan IPM.

### 3.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data panel, yaitu data yang terdiri dari dua bagian : (1) *time series* dan (2) *cross section*. Data *time series* yang digunakan adalah data tahunan selama empat tahun yaitu tahun 2012-2015, dalam kurun waktu empat tahun tersebut banyak terjadi fenomena ekonomi, sosial, dan politik. Adanya pemilu dan pergantian Pemerintahan Baru, kemudian terjadi pelemahan ekonomi luar negeri yang membawa dampak krisis bagi Indonesia khususnya Jawa Timur dan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Data *cross section* sebanyak tiga puluh delapan yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), DEPNAKERTRANS, dan jurnal online.

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi panel data (*pooling data*). Analisis regresi data panel adalah mengkombinasikan

antara analisis menggunakan *time series* dan *cross section*, (Gujarati dan Porter 2013:27). Regresi dengan menggunakan panel data (*pooling data*) memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:85-86), diantaranya sebagai berikut:

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih baik.
2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena ada masalah penghilangan variabel (*omitted variable*).
3. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
4. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni dan *cross section* murni.
5. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Sebagai contoh, fenomena seperti skala ekonomi dan perubahan teknologi.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Menurut (Rosadi, 2010:261) model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = x_{it}\beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$Y_{it}$  = observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t (yakni variabel dependen yang merupakan suatu data panel).

$x_{it}$  = konstanta, vektor k- variable independen/input/regresor dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t (yakni terdapat k variabel independen, dimana setiap variabel merupakan data panel).

$\beta_{it}$  = sama dengan  $\beta$ , yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikann bersifat konstan dalam waktu dan kategori silang.

$\varepsilon_{it}$  = komponen galat, yang diasumsikan memiliki harga mead 0 dan variansi homogenya dalam waktu (homoskedastisitas) serta independen dengan  $x_{it}$ .

Dengan melihat model di atas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :

$$TPT_{it} = f (PDRB_{it} + UMK_{it} + IPM_{it} )$$

Dari persamaan fungsi diatas maka dapat ditransformasikan kedalam model ekonometrika sebagai berikut :

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

UMK = Upah Minimum Kabupaten

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = *Cross section* (38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

t = *Time series* (2012-2015)

$\beta_0$  = *Intercept*

$\beta_1$  = Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka

$\beta_2$  = Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka



$\beta_3$  = Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka

$\varepsilon$  = Komponen error

### 3.3.2 Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Rosadi (2010:261-264) secara umum terdapat tiga model panel yang sering digunakan. Yaitu model *Common Effects*, model efek tetap (*fixed effect*), dan model efek acak (*random effect*).

#### a. Model *Common Effect*

Model *Common Effect Model* (CEM) adalah pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu.

#### b. Model *Fixed Effect*

Metode *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa slope konstan akan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa *eit* merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam *constat term* pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersept antar daerah, namun interseptnya sama antar waktu (*time variant*). Disamping itu, model itu mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu.

#### c. Model *Random Effects*

Model efek acak, meletakkan aisebagai gangguan spesifik kelompok seperti halnya *eit* kecuali mentapkan untuk tiap-tiap kelompok, tetapi gambaran tunggal yang memasukkan regresi sama untuk tiap-tiap periode, atau dengan kata lain *Random Effect Model* (REM) menganggap bahwa seluruh gangguan yang terjadi mempunyai sifat acak atau random.

### 3.3.3 Uji Model Data Panel

Penyelesaian model data panel dapat menggunakan *common effect method* (CEM), *fixed effect methode* (FEM) atau *random effect methode* (REM). Namun hasil koefisien dari masing-masing model akan sangat berbeda karena ketiga model memiliki asumsi yang berbeda. Sehingga akan timbul perbedaan dalam pengambilan keputusan saat melihat signifikansi dari variabel bebas yang ada di dalam model sehingga dibutuhkan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM untuk menganalisis penggunaan CEM, FEM atau REM yang lebih tepat (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:89-90).

Untuk menentukan metode yang paling cocok dipilih antara CEM, REM atau FEM diperlukan uji spesifikasi model yang tepat menggambarkan data (Rosadi, 2010:264-265), yakni menggunakan beberapa pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM .

#### a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* digunakan signifikansi Chow. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Model Common Effect

$H_1$  : Model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika Chow Statistik(*F- statistic*) > F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect method*).
2. Jika Chow Statistik(*F- statistic*) < F tabel, maka  $H_1$  ditolak dan lebih menggunakan CEM (*common effect method*).

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *fixed effects* dengan *random effects* digunakan signifikansi Hausman. Uji signifikansi Hausman menggunakan uji hipotesis berbentuk  $H_0 : E(C_i | X) = E(u) = 0$ , atau adanya efek acak di dalam model. Jika  $H_0$  ditolak maka model efek akan tetap digunakan. Dalam melakukan uji Hausman diperlukan asumsi banyaknya kategori silang lebih besar daripada jumlah variabel bebas termasuk konstanta yang ada pada model. Pengujian hipotesanya adalah sebagai berikut (Futurrohmin, 2011:60):

$H_0$  : Model Fixed Effect

$H_1$  : Model Random Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika *Chi-Square statistic* > *Chi-Square table*, maka  $H_0$  ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect methode*).
2. Jika *Chi-Square statistic* < *Chi-Square table*, maka  $H_1$  diterima dan lebih menggunakan REM (*random effect methode*).

c. Uji LM

Uji LM dilakukan untuk memilih model mana yang tepat antara *fixed effect* dengan *random effect* digunakan signifikansi LM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model Common Effect

$H_1$  : Model Random Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika Probabilitas hitung > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect model*).

2. Jika Probabilitas hitung  $< 0,05$  maka  $H_1$  ditolak dan lebih menggunakan REM (*random effect model*).

### 3.3.4 Uji Statistik

1. Uji-F (Secara Simultan)

Menurut Mulyono (1991:225) Uji signifikansi secara simultan merupakan uji hipotesa secara gabungan atau serentak untuk mengetahui hubungan antara  $X_1$  dengan  $X_2$  maupun  $X_3$  terhadap variabel  $Y$ . Dengan kriteria apabila probabilitas  $F_{hitung}$  lebih besar dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ) maka PDRB, UMK, dan IPM tidak nyata secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dan apabila probabilitas  $F$  hitung lebih kecil dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ) maka PDRB, UMK dan IPM berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Uji-t (Secara Parsial)

Menurut Mulyono (1991:224) Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel *independen* (individu) secara parsial mempengaruhi variabel *dependen*. Dengan kriteria jika nilai  $t$  hitung lebih kecil daripada nilai  $t$  tabel berdasarkan nilai *level of significance* ( $0,05$ ) maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan  $H_1$  ditolak. Dan jika nilai  $t$  hitung lebih besar daripada nilai  $t$  tabel berdasarkan nilai *level of significance* ( $0,05$ ) maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_1$  diterima. Dalam penelitian ini digunakan uji *one tailed*, yakni pengujian hipotesis yang sudah diketahui arah positif maupun negatifnya.

Hipotesis pengujian uji  $t$  adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Artinya apabila  $\beta_1$  sama dengan nol, maka variabel *independen* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*. Sedangkan

apabila  $\beta_1$  tidak sama dengan nol, maka variabel *independen* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*.

### 3. $R^2$ (Koefisien Determinasi Berganda)

Menurut Mulyono (1991:221-222),  $R^2$  atau koefisien determinan berganda merupakan suatu ukuran kesesuaian garis regresi terhadap adanya data yang dipakai dalam penelitian, atau menunjukkan proporsi dari variabel terikat dengan variabel bebas yang berfungsi untuk menjelaskan variabel terikat.

#### 3.3.5 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2007:91) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Jika variabel *independen* saling berkorelasi, maka variabel-variabel *independen* tersebut akan bernilai sama dengan nol. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel *independen* saling mempengaruhi ataukah tidak, apabila variabel *independen* saling mempengaruhi, maka akan menyebabkan nilai standar deviasi menjadi semakin tinggi dan nilai  $t$  kecil sehingga data tidak akan signifikan. Sehingga data akan dikatakan baik apabila data tersebut tidak mengandung multikol. Untuk mendeteksi ada multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai  $R^2$  lebih tinggi
- b. Nilai  $t$  dari semua variabel bebas tidak signifikan
- c. Tingginya nilai  $f$

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2007:105) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model



yang homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas). Dalam uji heteroskedastisitas yang diteliti adalah variannya, varian variabel *independen* harus konstan, tidak mengecil maupun membesar diantara variabel *independen* tersebut. Karena apabila salah satu variabel *independen* nilai variannya lebih besar atau lebih kecil dari variabel *independen* yang lain, maka nilai standar deviasi akan meningkat dan nilai t menjadi kecil, sehingga data dinyatakan tidak signifikan. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park yakni dengan cara meregres dari log residual yang dikuadratkan dengan variabel dependennya. Kriterianya jika t-statistik lebih besar daripada t-tabel ( $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ ) atau nilai probabilitasnya kurang dari sama dengan 0,05 ( $\text{prob} \leq 0,05$ ) maka diindikasikan terjadi adanya heteroskedastisitas. Namun jika t-statistiknya kurang dari t-tabel ( $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$ ) atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 ( $\text{prob} > 0,05$ ) maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

### 3. Uji Normalitas

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Jarque-Berra LM dan normalitas antara variabel *dependen* dan *independen* harus dipenuhi dalam hubungannya dengan keabsahan dengan dilakukannya uji t dan uji F. Jika variabel pengganggu memiliki distribusi normal maka uji t dan uji F dapat dilakukan, namun jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka tidak dilakukan uji t dan uji F melainkan hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtotik. Untuk mengukur kenormalan maka dilakukan perhitungan nilai Chi-square dan didasarkan *test of skewness* dan *kurtosis of residual*. (Wardhono, 2004:61), dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Cs-hitung  $>$  dari nilai Cs-tabel maka variabel pengganggu dari model adalah tidak normal.
- b. Apabila nilai Cs-hitung  $<$  dari nilai Cs-tabel maka variabel pengganggu dari model adalah normal.

Penelitian ini menggunakan Jarque-Berra Test dengan cara menghitung *skewness* dan *kurtosis*. Jika nilai probabilitas J-B hitung  $\leq$  nilai  $X^2$  (Chi Square)

tabel atau 5 persen maka nilai residual dikatakan tidak berdistribusi normal, jika nilai probabilitas J-B hitung  $\geq$  nilai  $X^2$  (Chi Square) tabel atau 5 persen maka nilai residual dikatakan berdistribusi normal (Wijayanto, 2010:75).

### 3.4 Definisi Variabel Operasional

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian . Variabel dibedakan menjadi dua yaitu, variabel bebas dan variabel terikat (Arikunto; 1996). Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Data tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini menggunakan data pada periode waktu tahun 2012-2015 yang dinyatakan dalam persen (%) per tahun.
2. Produk Domestik Regional Bruto (X1) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 periode waktu tahun 2012-2015 yang dinyatakan dalam (Milyar) per tahun.
3. Upah Minimum Kabupaten (X2) merupakan upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Data upah minimum Kabupaten dalam penelitian ini menggunakan data UMK periode waktu tahun 2012-2015 yang dinyatakan dalam (rupiah) per tahun.
4. IPM (X3) adalah mengukur persentase indeks komposit yang dihasilkan dari perhitungan komponen pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Data Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini menggunakan data IPM periode waktu tahun 2012-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen (%) per tahun.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel PDRB, UMK, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. PDRB menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi berorientasi pada padat modal sehingga banyak perusahaan yang mengurangi biaya inputnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantinya dengan teknologi. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
2. UMK menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Penetapan upah minimum yang tinggi akan membuat perusahaan melakukan efisiensi pengeluaran dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi dan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
3. IPM menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Hal ini karena tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memilih-milih pekerjaan sehingga akan memberikan waktu lebih lama untuk mendapat pekerjaan. Selain itu angka harapan hidup yang tinggi dan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai membawa dampak pada meningkatnya angka pengangguran.

## 5.2 Saran

1. Produk Domestik Regional Bruto dalam penelitian ini, jika PDRB meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Diperlukan usaha untuk lebih menekan angka pengangguran yaitu dengan cara lebih meningkatkan peran PDRB di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya agar menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu juga industri-industri berskala kecil, dan mendorong kenaikan investasi dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor dan meningkatkan sarana dan prasarana baik di desa maupun di Kota.
2. Upah Minimum Kabupaten dalam penelitian ini, jika upah minimum meningkat maka tidak akan terlalu berpengaruh dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah selalu memperhatikan kebijakannya terkait penetapan upah minimum secara baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada serta harus menjaga kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan tidak merugikan pengusaha.
3. Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini, jika IPM meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Diperlukan peran Pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan untuk menunjang keahlian, sehingga tenaga kerja mempunyai keahlian yang bisa diterima oleh pasar kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Rekha. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, GDP, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 1990-2010*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Pengangguran, Vol.1, (No.1)*.
- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran, Vol.1, (No.1)*. Hal: 4-9.
- Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota 2010-2015*. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jumlah penduduk Jawa Timur Kabupaten/Kota 2010-2015*. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 2010-2015*. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota 2010-2015*. Jawa Timur.
- Budiarto dan Munir. 1985. *Teknik Analisa Kependudukan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanudin, Muhammad. 2015. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten*



*Periode 2008-2013*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Daryanto, Arief dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. PT. Penerbit IPBPress. Bogor.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015. *Upah Minimum Kabupaten Jawa Timur*. Jawa Timur: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Futurrohmin, Rahmawati. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BPUniversitas Diponegoro, Semarang.

Gilarso, T.S. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius (Anggota IKPI).

Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika* . Jakarta: Erlangga.

Hasani, Akrom. 2010. *Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008*. Skripsi. FE-Undip.

Jatimprov.go.id

Kurniawan Cahyadi, Roby. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan study Pembangunan Universitas Brawijaya: Malang.

- Mankiw, Gregory. 2000. *Principle of Economics*. Hris Munadar (Penerjemah) dan Yatisumiharti (Editor). Pengantar Ekonomi Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, Gregory. 2007. *Principle of Economics*. Fitria Liza (Penerjemah) dan Imam Nurmawan (Editor). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, Gregory. 2008. *Makro Ekonomi Edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Marius, Jelamu Ardu. 2004. Memecahkan Masalah Pengangguran di Indonesia. Makalah pada Pengantar filsafah Sains S3 IPB, Bogor.
- Mulyono. 1991. *Operations Reseacrh*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nainggolan, Indra O. 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Nurcholis, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1 Juni 2014*.
- Rosadi, Dedi. 2010. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu terapan Dengan R Aplikasi Untuk Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Simanjuntak, Thamrin. 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Subagiarta, I Wayan. 2012. *Sumber Daya Manusia II*. Jember: FE Unej.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2015. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suryana.2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, Michael .P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael .P. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Unej.
- Wardhono, A.2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Wijaya, Radewa Rizki Mirma. 2014.*Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Wijayanto. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zahroo, Maulidatuz. 2017. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Jawa Barat*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor



**LAMPIRAN**

Lampiran A: Data TPT, PDRB, UMK dan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015

Kabupaten/kota	Tahun	TPT (%)	PDRB (Milyar rupiah)	UMK (rupiah)	IPM (%)
Kab. Pacitan	2012	1.02	7705	750000	62.94
Kab. Pacitan	2013	0.99	8157.6	887250	63.38
Kab. Pacitan	2014	1.08	8582.2	1000000	63.81
Kab. Pacitan	2015	0.97	9019.5	1150000	64.92
Kab. Ponorogo	2012	3.14	10038.4	745000	66.16
Kab. Ponorogo	2013	3.25	10554.5	924000	67.03
Kab. Ponorogo	2014	3.66	11104.5	1000000	67.40
Kab. Ponorogo	2015	3.68	11687.9	1150000	68.16
Kab. Trenggalek	2012	2.98	8959.5	760000	65.01
Kab. Trenggalek	2013	4.04	9496.7	903900	65.76
Kab. Trenggalek	2014	4.20	9998.5	1000000	66.16
Kab. Trenggalek	2015	2.46	10501.6	1150000	67.25
Kab. Tulungagung	2012	3.10	18999	815000	68.29
Kab. Tulungagung	2013	2.71	20164.3	1007900	69.30
Kab. Tulungagung	2014	2.42	21265.2	1107000	69.49
Kab. Tulungagung	2015	3.95	22326.6	1273050	70.07
Kab. Blitar	2012	2.82	18054.5	820000	66.17
Kab. Blitar	2013	3.64	18967.3	946850	66.49
Kab. Blitar	2014	3.08	19920.2	1000000	66.88
Kab. Blitar	2015	2.79	20925.5	1260000	68.13
Kab. Kediri	2012	4.08	20538.3	999000	67.29
Kab. Kediri	2013	4.65	21733.5	1089950	68.01
Kab. Kediri	2014	4.91	22890	1135000	68.44
Kab. Kediri	2015	5.02	24007.7	1305250	68.91
Kab. Malang	2012	3.75	47076	1130000	64.71
Kab. Malang	2013	5.17	49571.7	1343700	65.20
Kab. Malang	2014	4.83	52550.4	1635000	65.59
Kab. Malang	2015	4.95	55317.8	1962000	66.63
Kab. Lumajang	2012	4.60	16053.4	825391	61.31
Kab. Lumajang	2013	2.01	16949.6	1011950	61.87
Kab. Lumajang	2014	2.83	17851.9	1120000	62.33
Kab. Lumajang	2015	2.60	18676.9	1288000	63.02
Kab. Jember	2012	3.77	37262	920000	61.31



Kab. Jember	2013	3.94	39519.20	1091950	62.43
Kab. Jember	2014	4.64	41971.70	1270000	62.64
Kab. Jember	2015	4.77	44222.60	1460500	63.04
Kab. Banyuwangi	2012	3.41	37235.70	915000	66.12
Kab. Banyuwangi	2013	4.65	39733.60	1086400	66.74
Kab. Banyuwangi	2014	7.17	42005.70	1240000	67.31
Kab. Banyuwangi	2015	2.55	44529.90	1426000	68.08
Kab. Bondowoso	2012	3.60	9583.40	800000	62.24
Kab. Bondowoso	2013	2.04	10140.10	946000	63.21
Kab. Bondowoso	2014	3.72	10652.40	1105000	63.43
Kab. Bondowoso	2015	1.75	11179.60	1270750	63.95
Kab. Situbondo	2012	3.33	9411.60	802500	62.23
Kab. Situbondo	2013	3.01	9993.80	1048000	63.43
Kab. Situbondo	2014	4.15	10572.40	1071000	63.91
Kab. Situbondo	2015	3.57	11086.50	1209900	64.53
Kab. Probolinggo	2012	1.92	16936.80	888500	61.33
Kab. Probolinggo	2013	3.30	17808.90	1198600	62.61
Kab. Probolinggo	2014	1.47	18682.20	1353750	63.04
Kab. Probolinggo	2015	2.51	19571	1556800	63.83
Kab. Pasuruan	2012	6.38	70167.10	1252000	62.31
Kab. Pasuruan	2013	4.34	75044	1720000	63.74
Kab. Pasuruan	2014	4.43	80105.40	2190000	64.35
Kab. Pasuruan	2015	6.41	84415.70	2700000	65.04
Kab. Sidoarjo	2012	5.37	93543.90	1252000	75.14
Kab. Sidoarjo	2013	4.12	99992.50	1720000	76.39
Kab. Sidoarjo	2014	3.88	106434.30	2190000	76.78
Kab. Sidoarjo	2015	6.30	112012.90	2705000	77.43
Kab. Mojokerto	2012	3.35	39047.30	1234000	69.17
Kab. Mojokerto	2013	3.16	41608.40	1700000	69.84
Kab. Mojokerto	2014	3.81	44292	2050000	70.22
Kab. Mojokerto	2015	4.05	46792.30	2695000	70.85
Kab. Jombang	2012	6.72	19514.80	978200	67.82
Kab. Jombang	2013	5.59	20672.30	1200000	68.63
Kab. Jombang	2014	4.39	21793.20	1500000	69.07
Kab. Jombang	2015	6.11	22960.20	1725000	69.59
Kab. Nganjuk	2012	4.09	12767	785000	68.07
Kab. Nganjuk	2013	4.73	13456	960200	68.98
Kab. Nganjuk	2014	3.93	14142.90	1131000	69.59
Kab. Nganjuk	2015	2.10	14875.40	1265000	69.90
Kab. Madiun	2012	3.99	9135.70	775000	67.32
Kab. Madiun	2013	4.63	9654.10	960750	68.07

Kab. Madiun	2014	3.38	10169.70	1045000	68.60
Kab. Madiun	2015	6.99	10704.90	1196000	69.39
Kab. Magetan	2012	3.64	9251.20	750000	69.56
Kab. Magetan	2013	2.96	9792.60	866250	69.86
Kab. Magetan	2014	4.28	10291.70	1000000	70.29
Kab. Magetan	2015	6.05	10823.90	1150000	71.39
Kab. Ngawi	2012	2.94	9568.20	780000	66.72
Kab. Ngawi	2013	4.97	10094	900000	67.25
Kab. Ngawi	2014	5.61	10681	1040000	67.78
Kab. Ngawi	2015	3.99	11223.10	1150000	68.32
Kab. Bojonegoro	2012	3.42	38136.10	930000	64.20
Kab. Bojonegoro	2013	5.81	39039.40	1029500	64.85
Kab. Bojonegoro	2014	3.21	39934.80	1140000	65.27
Kab. Bojonegoro	2015	5.01	46892.80	1311000	66.17
Kab. Tuban	2012	4.13	31816.30	970000	63.36
Kab. Tuban	2013	4.30	33678.80	1144400	64.14
Kab. Tuban	2014	3.63	35519.90	1370000	64.58
Kab. Tuban	2015	3.03	37256	1575500	65.52
Kab. Lamongan	2012	4.75	18562.70	950000	67.51
Kab. Lamongan	2013	4.93	19848.80	1075700	68.90
Kab. Lamongan	2014	4.30	21099.90	1220000	69.42
Kab. Lamongan	2015	4.10	22316.90	1410000	69.84
Kab. Gresik	2012	6.78	67248.80	1257000	72.12
Kab. Gresik	2013	4.55	71314.20	1740000	72.47
Kab. Gresik	2014	5.06	76336	2195000	72.84
Kab. Gresik	2015	5.67	81360.40	2707500	73.57
Kab. Bangkalan	2012	5.13	16173.70	885000	59.65
Kab. Bangkalan	2013	6.78	16204	983800	60.19
Kab. Bangkalan	2014	5.68	17369.20	1102000	60.71
Kab. Bangkalan	2015	5.00	16906.80	1267300	61.49
Kab. Sampang	2012	1.71	10910.90	800000	55.78
Kab. Sampang	2013	4.68	11623.80	1104600	56.45
Kab. Sampang	2014	2.22	11632.90	1120000	56.98
Kab. Sampang	2015	2.51	11874.50	1231650	58.18
Kab. Pamekasan	2012	2.29	7894	975000	61.21
Kab. Pamekasan	2013	2.17	8375.20	1059600	62.27
Kab. Pamekasan	2014	2.14	8846.20	1090000	62.66
Kab. Pamekasan	2015	4.26	9316.90	1201750	63.10
Kab. Sumenep	2012	1.14	17665	825000	60.08
Kab. Sumenep	2013	2.56	20218.10	965000	60.84
Kab. Sumenep	2014	1.01	21476.90	1090000	61.43

Kab. Sumenep	2015	2.07	21750.60	1253500	62.38
Kota. Kediri	2012	8.12	63185.10	1037500	73.66
Kota. Kediri	2013	7.92	65408.80	1128400	74.18
Kota. Kediri	2014	7.66	69232.90	1165000	74.62
Kota. Kediri	2015	8.46	72945.50	1339750	75.67
Kota. Blitar	2012	3.68	3236.60	815000	73.53
Kota. Blitar	2013	6.17	3446.80	924800	74.53
Kota. Blitar	2014	5.71	3649.60	1000000	75.26
Kota. Blitar	2015	3.80	3856.90	1243200	76.00
Kota. Malang	2012	7.96	35355.70	1132000	78.04
Kota. Malang	2013	7.73	37547.70	1340300	78.44
Kota. Malang	2014	7.22	39724.70	1587000	78.96
Kota. Malang	2015	7.28	41952.10	1882250	80.05
Kota. Probolinggo	2012	5.26	5552.10	885000	68.93
Kota. Probolinggo	2013	4.48	5911.30	1103200	70.05
Kota. Probolinggo	2014	5.16	6261.90	1250000	70.49
Kota. Probolinggo	2015	4.01	6628.80	1437500	71.01
Kota. Pasuruan	2012	4.54	4051.20	975000	72.01
Kota. Pasuruan	2013	5.41	4315.10	1195800	72.89
Kota. Pasuruan	2014	6.09	4561.30	1360000	73.23
Kota. Pasuruan	2015	5.57	4813.30	1575000	73.78
Kota. Mojokerto	2012	7.52	3358.40	875000	74.20
Kota. Mojokerto	2013	5.73	3566.70	1040000	74.91
Kota. Mojokerto	2014	4.42	3774.60	1250000	75.04
Kota. Mojokerto	2015	4.88	3991.40	1437500	75.54
Kota. Madiun	2012	6.89	6937.70	812500	77.21
Kota. Madiun	2013	6.57	7470.70	953000	78.41
Kota. Madiun	2014	6.93	7965.30	1066000	78.81
Kota. Madiun	2015	5.10	8455.40	1250000	79.48
Kota. Surabaya	2012	5.27	265892.10	1257000	78.05
Kota. Surabaya	2013	5.32	286050.70	1740000	78.51
Kota. Surabaya	2014	5.82	305947.60	2200000	78.87
Kota. Surabaya	2015	7.01	324215.20	2710000	79.47
Kota. Batu	2012	3.51	7473.60	1100215	70.62
Kota. Batu	2013	2.30	8018.60	1268000	71.55
Kota. Batu	2014	2.43	8572.10	1580037	71.89
Kota. Batu	2015	4.29	9145.90	1877000	72.62

Lampiran B: Data TPT, PDRB, UMK, dan IPM setelah di LOG Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015

Kabupaten/kota	Tahun	TPT (%)	PDRB (Milyar rupiah)	UMK (rupiah)	IPM (%)
Kab. Pacitan	2012	1.02	8.949624748	13.52782849	62.94
Kab. Pacitan	2013	0.99	9.006705287	13.69588207	63.38
Kab. Pacitan	2014	1.08	9.05744557	13.81551056	63.81
Kab. Pacitan	2015	0.97	9.107144179	13.9552725	64.92
Kab. Ponorogo	2012	3.14	9.214173018	13.5211395	66.16
Kab. Ponorogo	2013	3.25	9.264307588	13.73646735	67.03
Kab. Ponorogo	2014	3.66	9.315105711	13.81551056	67.4
Kab. Ponorogo	2015	3.68	9.366309398	13.9552725	68.16
Kab. Trenggalek	2012	2.98	9.100469701	13.54107371	65.01
Kab. Trenggalek	2013	4.04	9.158699649	13.71447401	65.76
Kab. Trenggalek	2014	4.2	9.210190361	13.81551056	66.16
Kab. Trenggalek	2015	2.46	9.259282905	13.9552725	67.25
Kab. Tulungagung	2012	3.1	9.852141625	13.61094339	68.29
Kab. Tulungagung	2013	2.71	9.911668993	13.82337952	69.3
Kab. Tulungagung	2014	2.42	9.964827213	13.91716421	69.49
Kab. Tulungagung	2015	3.95	10.01353407	14.05692615	70.07
Kab. Blitar	2012	2.82	9.80115024	13.61705962	66.17
Kab. Blitar	2013	3.64	9.850471723	13.76089596	66.49
Kab. Blitar	2014	3.08	9.899489571	13.81551056	66.88
Kab. Blitar	2015	2.79	9.94872379	14.04662228	68.13
Kab. Kediri	2012	4.08	9.930046715	13.81451006	67.29
Kab. Kediri	2013	4.65	9.986610128	13.90164238	68.01
Kab. Kediri	2014	4.91	10.03845541	13.94214321	68.44
Kab. Kediri	2015	5.02	10.08612989	14.08190515	68.91
Kab. Malang	2012	3.75	10.7595186	13.93772819	64.71
Kab. Malang	2013	5.17	10.81117539	14.11093756	65.2
Kab. Malang	2014	4.83	10.86952799	14.30715336	65.59
Kab. Malang	2015	4.95	10.92085002	14.48947492	66.63
Kab. Lumajang	2012	4.6	9.683675944	13.62361249	61.31
Kab. Lumajang	2013	2.01	9.737999514	13.82738972	61.87
Kab. Lumajang	2014	2.83	9.789865224	13.92883924	62.33
Kab. Lumajang	2015	2.6	9.835042745	14.06860119	63.02
Kab. Jember	2012	3.77	10.52572932	13.73212895	61.31
Kab. Jember	2013	3.94	10.58454191	13.90347565	62.43
Kab. Jember	2014	4.64	10.64475086	14.05452746	62.64
Kab. Jember	2015	4.77	10.69699125	14.1942894	63.04
Kab. Banyuwangi	2012	3.41	10.52502326	13.72667934	66.12
Kab. Banyuwangi	2013	4.65	10.58995246	13.89838004	66.74

Kab. Banyuwangi	2014	7.17	10.6455606	14.03062194	67.31
Kab. Banyuwangi	2015	2.55	10.70391615	14.17038388	68.08
Kab. Bondowoso	2012	3.6	9.167787714	13.59236701	62.24
Kab. Bondowoso	2013	2.04	9.224253139	13.75999785	63.21
Kab. Bondowoso	2014	3.72	9.273540498	13.91535589	63.43
Kab. Bondowoso	2015	1.75	9.321845968	14.05511784	63.95
Kab. Situbondo	2012	3.33	9.14969825	13.59548713	62.23
Kab. Situbondo	2013	3.01	9.20972018	13.86239414	63.43
Kab. Situbondo	2014	4.15	9.266002111	13.88410335	63.91
Kab. Situbondo	2015	3.57	9.313483431	14.00604827	64.53
Kab. Probolinggo	2012	1.92	9.737244048	13.69728993	61.33
Kab. Probolinggo	2013	3.3	9.787453611	13.99666477	62.61
Kab. Probolinggo	2014	1.47	9.835326478	14.11838908	63.04
Kab. Probolinggo	2015	2.51	9.881804158	14.25814299	63.83
Kab. Pasuruan	2012	6.38	11.15863482	14.04025283	62.31
Kab. Pasuruan	2013	4.34	11.22582989	14.35783485	63.74
Kab. Pasuruan	2014	4.43	11.29109855	14.5994121	64.35
Kab. Pasuruan	2015	6.41	11.34350868	14.80876233	65.04
Kab. Sidoarjo	2012	5.37	11.44618612	14.04025283	75.14
Kab. Sidoarjo	2013	4.12	11.51285046	14.35783485	76.39
Kab. Sidoarjo	2014	3.88	11.57528317	14.5994121	76.78
Kab. Sidoarjo	2015	6.3	11.62636932	14.81061247	77.43
Kab. Mojokerto	2012	3.35	10.57252901	14.02577148	69.17
Kab. Mojokerto	2013	3.16	10.63605735	14.34613881	69.84
Kab. Mojokerto	2014	3.81	10.69855935	14.53335035	70.22
Kab. Mojokerto	2015	4.05	10.75347394	14.80690876	70.85
Kab. Jombang	2012	6.72	9.878928431	13.79346943	67.82
Kab. Jombang	2013	5.59	9.936549919	13.99783211	68.63
Kab. Jombang	2014	4.39	9.989353274	14.22097567	69.07
Kab. Jombang	2015	6.11	10.04151756	14.36073761	69.59
Kab. Nganjuk	2012	4.09	9.454618996	13.573439	68.07
Kab. Nganjuk	2013	4.73	9.507180382	13.77489688	68.98
Kab. Nganjuk	2014	3.93	9.55696801	13.93861276	69.59
Kab. Nganjuk	2015	2.1	9.607464121	14.05058268	69.9
Kab. Madiun	2012	3.99	9.119945094	13.56061831	67.32
Kab. Madiun	2013	4.63	9.175137975	13.77546951	68.07
Kab. Madiun	2014	3.38	9.22716799	13.85952744	68.6
Kab. Madiun	2015	6.99	9.27845686	13.99449321	69.39
Kab. Magetan	2012	3.64	9.132508552	13.52782849	69.56
Kab. Magetan	2013	2.96	9.189382277	13.67192883	69.86
Kab. Magetan	2014	4.28	9.239093024	13.81551056	70.29
Kab. Magetan	2015	6.05	9.289511931	13.9552725	71.39



Kab. Ngawi	2012	2.94	9.166200379	13.5670492	66.72
Kab. Ngawi	2013	4.97	9.219696467	13.71015004	67.25
Kab. Ngawi	2014	5.61	9.276221741	13.85473127	67.78
Kab. Ngawi	2015	3.99	9.325729433	13.9552725	68.32
Kab. Bojonegoro	2012	3.42	10.54891662	13.74293987	64.2
Kab. Bojonegoro	2013	5.81	10.57232667	13.84458381	64.85
Kab. Bojonegoro	2014	3.21	10.5950034	13.94653882	65.27
Kab. Bojonegoro	2015	5.01	10.75561942	14.08630076	66.17
Kab. Tuban	2012	4.13	10.36773402	13.78505135	63.36
Kab. Tuban	2013	4.3	10.42462384	13.95039104	64.14
Kab. Tuban	2014	3.63	10.47784838	14.1303213	64.58
Kab. Tuban	2015	3.03	10.52556828	14.27008324	65.52
Kab. Lamongan	2012	4.75	9.82890947	13.76421726	67.51
Kab. Lamongan	2013	4.93	9.895898831	13.88848217	68.9
Kab. Lamongan	2014	4.3	9.95702358	14.01436142	69.42
Kab. Lamongan	2015	4.1	10.01309952	14.15910026	69.84
Kab. Gresik	2012	6.78	11.11615445	14.04423849	72.12
Kab. Gresik	2013	4.55	11.17485075	14.36939567	72.47
Kab. Gresik	2014	5.06	11.24289993	14.6016926	72.84
Kab. Gresik	2015	5.67	11.30664395	14.81153626	73.57
Kab. Bangkalan	2012	5.13	9.691141745	13.69334292	59.65
Kab. Bangkalan	2013	6.78	9.693013404	13.7991779	60.19
Kab. Bangkalan	2014	5.68	9.762453802	13.91263727	60.71
Kab. Bangkalan	2015	5	9.735471187	14.05239921	61.49
Kab. Sampang	2012	1.71	9.297517569	13.59236701	55.78
Kab. Sampang	2013	4.68	9.360809999	13.91499384	56.45
Kab. Sampang	2014	2.22	9.36159257	13.92883924	56.98
Kab. Sampang	2015	2.51	9.382148523	14.02386529	58.18
Kab. Pamekasan	2012	2.29	8.973858256	13.79019275	61.21
Kab. Pamekasan	2013	2.17	9.033030237	13.87340204	62.27
Kab. Pamekasan	2014	2.14	9.087743267	13.90168825	62.66
Kab. Pamekasan	2015	4.26	9.139585234	13.99928939	63.1
Kab. Sumenep	2012	1.14	9.77934056	13.62313867	60.08
Kab. Sumenep	2013	2.56	9.914333522	13.77988338	60.84
Kab. Sumenep	2014	1.01	9.974733218	13.90168825	61.43
Kab. Sumenep	2015	2.07	9.987396622	14.0414502	62.38
Kota. Kediri	2012	8.12	11.05382379	13.85232453	73.66
Kota. Kediri	2013	7.92	11.08841208	13.93631126	74.18
Kota. Kediri	2014	7.66	11.14523146	13.96823164	74.62
Kota. Kediri	2015	8.46	11.19746787	14.10799359	75.67
Kota. Blitar	2012	3.68	8.082278675	13.61094339	73.53
Kota. Blitar	2013	6.17	8.145201543	13.73733278	74.53

Kota. Blitar	2014	5.71	8.202372852	13.81551056	75.26
Kota. Blitar	2015	3.8	8.257619031	14.03319926	76
Kota. Malang	2012	7.96	10.4732149	13.93949654	78.04
Kota. Malang	2013	7.73	10.5333674	14.10840403	78.44
Kota. Malang	2014	7.22	10.58972844	14.277356	78.96
Kota. Malang	2015	7.28	10.64428377	14.44797843	80.05
Kota. Probolinggo	2012	5.26	8.621931514	13.69334292	68.93
Kota. Probolinggo	2013	4.48	8.684621052	13.91372561	70.05
Kota. Probolinggo	2014	5.16	8.742238932	14.03865411	70.49
Kota. Probolinggo	2015	4.01	8.799179071	14.17841605	71.01
Kota. Pasuruan	2012	4.54	8.306768413	13.79019275	72.01
Kota. Pasuruan	2013	5.41	8.369875778	13.99432598	72.89
Kota. Pasuruan	2014	6.09	8.42536295	14.12299526	73.23
Kota. Pasuruan	2015	5.57	8.479138199	14.26976583	73.78
Kota. Mojokerto	2012	7.52	8.119219949	13.68197917	74.2
Kota. Mojokerto	2013	5.73	8.179396078	13.85473127	74.91
Kota. Mojokerto	2014	4.42	8.236049696	14.03865411	75.04
Kota. Mojokerto	2015	4.88	8.291897326	14.17841605	75.54
Kota. Madiun	2012	6.89	8.844725586	13.60787119	77.21
Kota. Madiun	2013	6.57	8.918743982	13.76737018	78.41
Kota. Madiun	2014	6.93	8.982849886	13.87942388	78.81
Kota. Madiun	2015	5.1	9.042560569	14.03865411	79.48
Kota. Surabaya	2012	5.27	12.49084587	14.04423849	78.05
Kota. Surabaya	2013	5.32	12.56392435	14.36939567	78.51
Kota. Surabaya	2014	5.82	12.63116912	14.60396792	78.87
Kota. Surabaya	2015	7.01	12.68916277	14.81245919	79.47
Kota. Batu	2012	3.51	8.91913209	13.91101617	70.62
Kota. Batu	2013	2.3	8.989519122	14.05295141	71.55
Kota. Batu	2014	2.43	9.056268022	14.27295882	71.89
Kota. Batu	2015	4.29	9.12106097	14.44518532	72.62

Lampiran C: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.991727	(37,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	148.091638	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/21/18 Time: 14:32  
Sample: 2012 2015  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.616913	5.894781	-0.783220	0.4347
PDRB	0.411228	0.138643	2.966088	0.0035
UMK	-0.520898	0.496896	-1.048304	0.2962
IPM	0.178136	0.021489	8.289775	0.0000
R-squared	0.376396	Mean dependent var		4.286776
Adjusted R-squared	0.363755	S.D. dependent var		1.672197
S.E. of regression	1.333827	Akaike info criterion		3.439945
Sum squared resid	263.3060	Schwarz criterion		3.519521
Log likelihood	-257.4358	Hannan-Quinn criter.		3.472272
F-statistic	29.77666	Durbin-Watson stat		1.007187
Prob(F-statistic)	0.000000			

LampiranD: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.692202	3	0.6522

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	5.752200	0.433354	21.932647	0.2561
UMK	-1.127521	-0.630681	1.718782	0.7047
IPM	-0.164859	0.177509	0.111974	0.3062

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/21/18 Time: 14:32

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25.33431	23.07644	-1.097843	0.2746
PDRB	5.752200	4.687659	1.227095	0.2224
UMK	-1.127521	1.385708	-0.813679	0.4176
IPM	-0.164859	0.336391	-0.490081	0.6250

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.763060	Mean dependent var	4.286776
Adjusted R-squared	0.677676	S.D. dependent var	1.672197
S.E. of regression	0.949366	Akaike info criterion	2.959079
Sum squared resid	100.0439	Schwarz criterion	3.774731
Log likelihood	-183.8900	Hannan-Quinn criter.	3.290425
F-statistic	8.936814	Durbin-Watson stat	2.629998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E: Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
(all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	53.84032 (0.0000)	1.783516 (0.1817)	55.62383 (0.0000)
Honda	7.337596 (0.0000)	-1.335483 --	4.244135 (0.0000)
King-Wu	7.337596 (0.0000)	-1.335483 --	0.725057 (0.2342)
Standardized Honda	7.827477 (0.0000)	-1.063819 --	0.318571 (0.3750)
Standardized King-Wu	7.827477 (0.0000)	-1.063819 --	-1.869258 --
Gourierioux, et al.*	--	--	53.84032 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	



Lampiran F: Hasil Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/21/18 Time: 14:34  
 Sample: 2012 2015  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 152  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.257133	5.237904	-0.621839	0.5350
PDRB	0.433354	0.203710	2.127310	0.0351
UMK	-0.630681	0.448783	-1.405314	0.1620
IPM	0.177509	0.034422	5.156926	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.981398	0.5166
Idiosyncratic random		0.949366	0.4834

Weighted Statistics			
R-squared	0.386100	Mean dependent var	1.866557
Adjusted R-squared	0.169602	S.D. dependent var	1.036847
S.E. of regression	0.944839	Sum squared resid	132.1228
F-statistic	11.28016	Durbin-Watson stat	2.007284
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.376134	Mean dependent var	4.286776
Sum squared resid	263.4165	Durbin-Watson stat	1.006801

Lampiran G: Hasil Uji F

R-squared	0.386100	Mean dependent var	1.866557
Adjusted R-squared	0.169602	S.D. dependent var	1.036847
S.E. of regression	0.944839	Sum squared resid	132.1228
F-statistic	11.28016	Durbin-Watson stat	2.007284
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran H: Hasil Uji t

Variabel	Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keterangan
PDRB	0.0351	0.05	Signifikan
UMK	0.1620	0.05	Tidak Signifikan
IPM	0.0000	0.05	Signifikan

Lampiran I: Hasil ( $R^2$ )

R-squared	0.386100	Mean dependent var	1.866557
Adjusted R-squared	0.169602	S.D. dependent var	1.036847
S.E. of regression	0.944839	Sum squared resid	132.1228
F-statistic	11.28016	Durbin-Watson stat	2.007284
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran J: Hasil Uji Multikolinearitas

		PDRB	UMK	IPM
	1.000000	0.266387	0.256963	0.580245
PDRB	0.266387	1.000000	0.578941	0.139456
UMK	0.256963	0.578941	1.000000	0.360216
IPM	0.580245	0.139456	0.360216	1.000000

Lampiran K: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Date: 02/21/18 Time: 14:35

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 152

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.574169	3.429876	1.333625	0.1844
PDRB	0.132606	0.099994	1.326150	0.1868
UMK	-0.366355	0.290615	-1.260621	0.2094
IPM	0.004574	0.016307	0.280508	0.7795

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.383551	0.2433
Idiosyncratic random		0.676380	0.7567

Weighted Statistics			
R-squared	0.014896	Mean dependent var	0.707076
Adjusted R-squared	-0.005072	S.D. dependent var	0.676257
S.E. of regression	0.677969	Sum squared resid	68.02711
F-statistic	0.746002	Durbin-Watson stat	1.892616
Prob(F-statistic)	0.526312		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.018137	Mean dependent var	1.069124
Sum squared resid	88.05026	Durbin-Watson stat	1.462224

Lampiran L: Hasil Uji Normalitas

